

Laporan Penelitian Relasi Tasawuf dan Politik

by Suhayib Suhayib

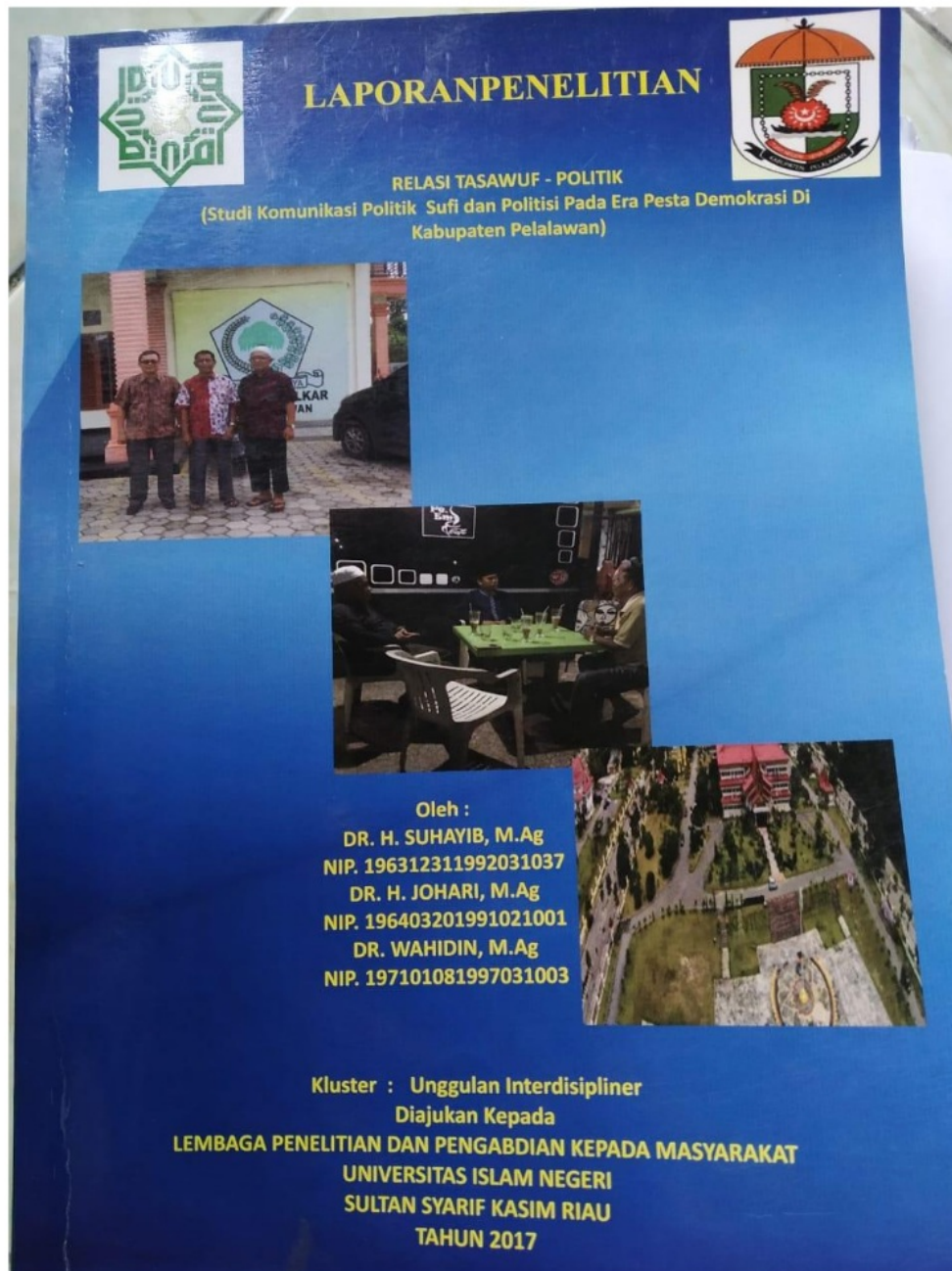
Submission date: 28-Mar-2021 08:33PM (UTC+0700)

Submission ID: 1544309793

File name: Laporan_Penelitian_2017.pdf (931.87K)

Word count: 9231

Character count: 59065



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipersembahkan kepada Zat Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk-Nya yang terbaik. Diciptakan dalam keadaan berpasangan, laki-laki dan perempuan, bersuku bangsa untuk saling kenal mengenal. Solawat dan salam diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia untuk merangkai silaturahmi kepada sesama.

Penelitian tentang komunikasi politik antara politisi dan sufi sebenarnya bukan hal yang baru. Hal itu ditunjukkan dengan adanya relasi kebersamaan diantara keduanya sejak masa silam. Kehidupan kerohanian sufi telah tumbuh dan berkembang seiring dengan mendalamnya penghayatan manusia kepada agama. Kecendrungan untuk menekuni keislaman yang esoteric telah berkembang seiring dengan dakwah nabi Muhammad di kalangan Shahabat yang dibuktikan dengan keberadaan *ahlu as-Shuffah* di kota Madinah.

Demikian pula dengan politik yang merupakan cara manusia untuk mewujudkan cita-cita baik secara individu maupun kolektif. Keberhasilan Nabi Muhamamad membangun peradaban di Kota Madinah tidak terlepas dari kegiatan politik. Islam tidak menapikan politik.

Dekade sekarang ini menjadi bagian terpenting untuk membangun kembali relasi politik politisi sufi dengan baik. Salah satunya dengan mencermati relasi yang dibangun oleh politisi dengan penganut tharikat Naqsabandiyah al-Khalidiyah di Kabupaten Pelalwan pada tahun 2014 dalam ajang pemilihan Anggota DPRD periode 2014-2019. Hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat sisi-sisi yang mungkin untuk diperbaiki dalam rangka membangun kebersamaan politisi sufi.

Pekanbaru, Nopember 2017

Peneliti :

DR. H. SUHAYIB, M.Ag

DR. H. JOHARI, M.Ag

DR. WAHIDIN, M.Ag

Daftar Isi

Halaman Depan	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA YANG RELEVAN	11
 BAB III	
METODE PENELITIAN	15
A. Jenis Penelitian	15
B. Sumber Data	15
C. Teknik Pengumpulan Data	16
D. Analisis Data	18
E. Sistematika Pembahasan	19
 BAB IV LAPORAN PENELITIAN	 20
A. Sejarah Kabupaten Pelalawan	20
B. Komunikasi Politik Politisi-Sufi	26
1. Komunikasi	26
2. Politik	30
3. Komunikasi Politik	33
C. Komunikasi Politisi Sufi di Pelalawan	36
D. Realitas Komunikasi Politik 2014 di Kabupaten Pelalawan	38
 BAB V PENUTUP	 49
A. Kesimpulan	49
B. Penutup	50
 DAFTAR PUSTAKA	 51
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kontemporer, tasawuf dan politik menjadi dua hal yang paradoks. Kehidupan politik yang lebih cenderung bersifat duniawi dan materialistik menjadi alasan mendasar bagi para sufi untuk menjauhinya. Sementara itu, banyak politisi memandang bahwa kehidupan sufi hanya akan mengekang kreatifitas dan ambisi politik, eksklusif dan asosial. Oleh sebab itu menjadi seorang sufi, bagi sebagian kalangan, berarti sikap apatis terhadap hal-hal yang bersifat duniawi dan bahkan cenderung sekuler, termasuk bidang politik. Namun sebagian sufi justru menjadikan jama'ahnya untuk mengadakan mobilisasi massa dan mencapai tujuan-tujuan politik. Banyak pula politisi yang membangun komunikasi politik dengan kalangan sufi seperti pada masa-masa pesta demokrasi.

Tasawuf dan politik merupakan dua disiplin ilmu yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk menemukan jati dirinya. Tasawuf menurut Zakaria al-Ansari adalah ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti serta pembangunan lahir dan batin, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi.¹ Sementara politik berusaha membangun system apa yang paling baik untuk menjamin adanya pemenuhan

¹Lihat Syekh Abdul Qadir Isa. *Hakekat Tasawuf*, terj. Khairul Amru Harahap dkk., Jakarta: Qisthi Press, 2011, hal. 5

kebutuhan,² bukan saja bagi kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.³

Tasawuf dan Politik dalam pengertian di atas sama-sama memiliki tujuan kemanusiaan yang hendak dicapai. Sinergi ini dalam waktu-waktu tertentu selalu teralisasi dalam bentuk komunikasi politik, dan pada waktu lainnya selalu berbenturan dan saling terkesampingkan.

Ahmad Shalabi menggambarkan sinergi antara tasawuf dan politik. Menurutnya, pada era Turki Utsmani telah menjadi masa yang dipenuhi dengan kehidupan bertasawuf yang menyelimuti dunia Islam. Sehingga tidak ada satu kota atau pun desa yang tidak dimasuki gerakan sufi dan tasawuf ini; Kalangan sufi memiliki posisi yang sangat terhormat di dua abad terakhir tersebut (abad ke-18 dan 19 M). Banyak sultan Utsmani yang demikian peduli dan berafiliasi dengan kaum sufi. Dan tentara sangat takut dengan perlawanan mereka dan mereka takut pada guru spiritual mereka.⁴

Pada abad pertengahan, Murabithûn (1086-1147 M) dan Muwahidûn (1145-1235 M) merupakan dua negara (daulah) yang didirikan oleh gerakan keagamaan sufi.

Dinasti Murabithun didirikan oleh Yusuf Ibn Tasyfin yang juga dikenal sebagai pendiri ibu kota Marokko tahun 1062 M, wilayah kekuasaannya (1086-

² SP. Varma. *Teori Politik Modern*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.3

³ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.24

⁴Ali Muhammad ash-Shalabi. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 641-643

1147) termasuk Aljazair di benua Afrika, dan Granada, Seville dan Kordova di Eropa.

Dinasti Muwahidun (1145-1235) didirikan pada awal abad ke-12 M oleh Muhammad Ibn Tumar. Ia pernah menetap di Bagdad dan menjadi salah seorang mahasiswa Imam al Ghazali. Dinasti Muwahidun menggantikan dinasti Murabithun dan tidak hanya menguasai seluruh wilayah kekuasaannya, tapi juga memperluas wilayah kekuasaan dari Tripoli di sebelah Timur sampai ke tepi Samudera Atlantik di sebelah Barat.⁵

Jejak-jejak sufi pada Kesultanan di sepanjang negeri Melayu juga memiliki catatan sejarah yang tidak dapat diabaikan, baik dalam usaha mendirikan kesultanan maupun dalam rangka membangun tegaknya kedaulatan Kerajaan atau Negara. Sultan Muhammad Shah di Brunei yang diistilahkan sebagai sultan Berkah bagi Negara Islam Brunei juga beraliran sufi, Syekh Yusuf Makassar di Kesultanan Goa dan Kesultanan Banten juga seorang penganut tarekat. Demikian pula dengan Syekh Abdus Samad al-Palimbani di Palembang, Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan di kerajaan Siak Sri Indrapura. Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddik di Kerajaan Indragiri, mereka adalah para sufi yang dibuktikan dengan karya mereka dalam bidang tasawuf. Oleh sebab itu, jejak sufi dapat ditelusuri sepanjang zaman dan keseluruhan belahan dunia, karenanya tidak mengejutkan kalau lahir ungkapan sufi membangun dunia.

⁵Kata *Murabithun* berasal *ribath* yaitu tempat bertahannus dan bertawajjuh mursyid dan murid tarikat, sama dengan surau suluk di Indonesia. Thomas W. Arnold. *Sejarah Da'wah Islam*, terj. Nawawi Rambe, Jakarta: Widjaya, 1985, hlm. 276-277

Berpatokan pada kenyataan di atas maka dapat dipastikan bahwa tidak selamanya dan tidak semua sufi yang antipasti terhadap kehidupan duniawi. Banyak dari mereka yang justru mempertaruhkan jiwa raga demi tegakkan syari'at di negeri berdaulat.

Selain persamaan tujuan bagi pemenuhan kebutuhan baik dalam tasawuf maupun dalam politik, namun ada persimpangan jalan diantara keduanya. Cermin kehidupan sufistik dapat digambarkan sebagai cara menjalani kehidupan yang disibukkan dengan term *mujâhadah*, *Maqâmât*, *al-Ahwâl*, *fana* yang dirumuskan agar seseorang dapat mencapai puncak pensucian diri dan kedekatan hubungan dengan Allah SWT.

Apa yang hendak mereka capai melalui term-term di atas merupakan target yang ditunjukkan Allah SWT dalam al Qurân, seperti QS. 29; 69,⁶ dan QS.5; 35.⁷

Berdasarkan contoh pada dua ayat tersebut, kebanyakan sufi larut dalam upaya pemantapan kesalehan diri dengan menjalankan kehidupan *zuhud*, *bertahannus* atau *uzlah* di tempat-tempat tertentu seperti *ribath* dan surau suluk. Praktek seperti kehidupan sufi tersebut oleh sebagian kalangan dipandang sebagai sikap apatis terhadap hal-hal bersifat keduniawiaan, termasuk bidang politik.⁸

⁶Departemen Agama RI, *Al Qurân dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al Qurân, 1971, hlm. 638

⁷*Ibid*, hlm. 165

⁸Suhayib. "Pemikiran Tasawuf Nursi dalam Pemberdayaan Politik (*al-Tamkin al-Siyasi*) Masyarakat Muslim Turki (Studi Atas Kitab *Al-Matsnawi An-Nuri*)", *An-Nida'*, Vol. 38 No. 1 Januari – Juni 2013, hlm. 60

Praktek seperti zuhud, uzlah dan suluk yang mencerminkan doktrin pokok tasawuf menggiring cara hidup sufi pada kehidupan yang eksklusif dan asosial.⁹

Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada dipinggir sungai Kampar. Kerajaan ini bulai berdiri tahun 1726 M dan berakhir tahun 1945 M.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 dan surat operasional pemerintahan daerah tanggal 5 Desember 1999 Pelalawan resmi menjadi Kabupaten Pelalawan dengan ibu Kota Pangkalan Kerinci.

Dengan usianya yang relative masih muda, Kabupaten Pelalawan sudah melakukan tiga kali ajang pesta Demokrasi, baik untuk pemilihan Bupati maupun pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Bupati tahun 2006, 2011 dan pilkada serentak tahun 2015. Sementara pemilihan legeslatif pada tahun 2006, 2011 dan 2014.

Pesta Demokrasi pemilihan wakil rakyat tahun 2014 menghasilkan 35 wajah anggota DPRD baru periode 2014-2019.

⁹Menurut Zaprul, pada mulanya ketika Nursi melontarkan kritik terhadap sufisme yang sudah menjadi organisasi-organisasi eksklusif dengan sistem uniknya masing-masing, ia memang mengajukan sejumlah argumentasi yang cukup ideal dan bersifat inklusif agar dapat diterima oleh semua kaum Muslim. Ia bersuara lantang bahwa tujuan universal dan paling krusial sosial masyarakat Turki ialah menyelamatkan keimanan mayoritas masyarakat Muslim Turki yang mulai mengalami krisis keyakinan diterjang badai materialisme dan sekularisme yang dipropagandakan bangsa-bangsa Eropa. Lihat Said Nursi, *Al-Malâhiq*, tarj, Ihsan Qasim Salih (Istanbul: Sozler Yayinevi, 1995), hlm. 259, 263, & 309. Bandingkan dengan Ibrahim Abu Rabi' & Jane I. Smith (eds.), *Special Issue Said Nursi and the Turkis Experience, The Muslim World*, Vol. LXXXIV, No. 3-4. July-October, 1999, hlm.199

2

Dapil Satu dengan jumlah 12 kursi, meliputi wilayah pemilihan Kecamatan Bandar Seikijang, kecamatan Langgam dan Kecamatan Pangkalan Kerinci diantaranya : 1. Ir. Rustam Sinaga (Nasdem) 2. H. Abdullah (PKS) 3. Syafrizal SE (PDIP) 4. Saniman, SE (PDIP) 5. Fatmalena (PG) 6. Afrizal (PG) 7. Faizal, SE.M.Si (Gerindra) 8. Monang Pasaribu (PD) 9. Beny Ilham (PAN) 10. Junaidi Purba (PPP) 11. Eliman M (Hanura) 12. Mardemis (PBB.).

Dapil Dua dengan wilayah pemilihan Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar dengan jumlah 9 kursi di wilayah tersebut yang akan duduk di kursi legislatif diantaranya : 1. Eka Putra (Golkar) 2. Said Mashudi,(Golkar) 3. H. Indra Mansur (Golkar) 4 Nazaruddin Arnazh (PAN) 5. Evi Zulvian (Demokrat) 6. Indra Kampe (Gerindra) 7. T. Khairil (Hanura) 8. Nurulhadi (PPP) 9. Suprianto SP (PDI-P).

Dapil Tiga, meliputi Kecamatan Ukui dan Kecamatan Kerumutan : 1. Imustiar (Golkar) 2. Rinto (Golkar) 3. Replita (Golkar) 4. Kasyadi (PDI-P) 5. Sudirman (PAN) 6. Ade Irawan (Gerindra).

Dapil Empat, yang meliputi Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Pangkalan Kuras dengan jumlah 8 kursi di wilayah tersebut yang akan duduk di kursi legislatif diantaranya : 1. Rahman Wijayanto (PKB) 2. Suprianto Agustinus (PDI-P) 3. Nasaruddin (Golkar) 4. Baharuddin (Golkar) 5. A. Mudzakir (Golkar) 6. Oerpan (Gerindra) 7. Habibi Hapri (PAN) 8. Mukhlis Ali (Hanura).

Sebagai catatan, untuk jumlah perolehan kursi di DPRD Pelalawan, Golkar meraih 11 kursi, PDI-P 5 kursi, Gerindra 4 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 3 kursi, PPP 2 kursi, Demokrat 2 kursi, Nasdem 1 kursi, PKS 1 kursi, PKB 1 kursi dan PBB 1 kursi.

Tabel 1.1
Perolehan Kursi DPRD Pelalawan Tahun 2014

No	PARTAI	JLH. KURSI	KET.
1	GOLKAR	11	
2	PDI-P	5	
3	GERINDRA	4	
4	PAN	4	
5	HANURA	3	
6	PPP	2	
7	DEMOKRAT	2	
8	NASDEM	1	
9	PKS	1	
10	PKB	1	
11	PBB	1	
JUMLAH		35	

Sumber: Data Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2015

Berdasarkan table di atas terlihat ada sesuatu yang mengalami perubahan secara factual. Pada umumnya dan merupakan kenyataan di lapangan bahwa penganut thariqat yang notabene mereka adalah orang-orang sufi berafiliasi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun kenyataan di atas justru PPP hanya

mendapatkan satu kursi di wilayah yang sangat kental dengan kesufiannya. Persoalan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam, disebabkan pergeseran yang terjadi dan hal-hal yang mempengaruhi fluktuasi perolehan suara di daerah berbasis thariqat.

Dari pemaparan seperti telah disebutkan maka dapat dipahami bahwa tasawuf dan politik dalam kurun tertentu telah membuat catatan sejarah bertinta emas dengan membangun kesultanan besar seperti kesultanan Utsmani, Muwahhidun, Murabithun. Dan berbagai kesultanan di negeri Melayu. Pada era tertentu tasawuf dan politik kemudian dipertentangkan menjadi dua kubu yang berseberangan, namun harmonisasi kembali terjadi dengan membangun komunikasi politik secara intens dalam masa-masa seperti pesta demokrasi. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul;

RELASI TASAWUF POLITIK (Studi Komunikasi Politik Sufi dan Politisi Pada Era Pesta Demokrasi Di Kabupaten Pelalawan)

E. Permasalahan

F. Identifikasi Masalah

- a. Eksistensi jamaah tasawuf
- b. Dinamika politik dalam pesta Demokrasi
- c. Pengaruh materialistic dan sekularisasi dalam kehidupan modern
- d. Komunikasi politik pada pesta demokrasi dan pasca pesta demokrasi
- e. Pengaruh tokoh tasawuf dalam pesta demokrasi

G. Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya ruang lingkup pembahasan ini, maka akan dibatasi pada bagaimana Relasi Tasawuf Politik pada Era Pesta Demokrasi pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan tahun 2014.

H. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

- a. Bagaimana hubungan Politisi dan Sufi pada masa Pesta Demokrasi di Kabupaten Pelalawan ?
- b. Bagaimana Peran Sufi dalam Pesta Demokrasi di Kabupaten Pelalawan ?

I. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

Pertama, untuk mengetahui hubungan politisi dan sufi pada masa pesta demokrasi di Kabupaten Pelalawan

Kedua, untuk mengetahui bagaimana peran dan pengaruh sufi pada masa pesta demokrasi di Kabupaten Pelalawan.

Ketiga, untuk mengetahui bagaimana sikap politik sufi di Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan akademik, khususnya pada bidang fiqh Siyasah dan tasawuf.
- b. Memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana hubungan antara politisi dan sufi dalam usaha mencapai tujuan.
- c. Menemukan jawaban yang riil bahwa kehidupan sufisme sesungguhnya tidak anti duniawi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA YANG RELEVAN

Setidaknya ada tujuh karya ilmiah tentang Said Nursi yang telah dihasilkan secara personal, antara lain;

1. Suhayib, “Menelusuri Akar Sejarah dan Aktivitas Jamaah Tarekat Naqsabandiyah di Kabupaten Pelalawan” Laporan Penelitian yang dibiayai melalui Proyek Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA UIN Suska tahun 2008. Hasil penelitian ini merupakan studi komprehensif tentang keberadaan penganut thariqat di Kabupaten Pelalawan. Keberadaan jamaah thariqat di Pelalawan jauh lebih awal dari negeri ini menjadi besar dan mewah dengan status kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian ini juga menggambarkan tentang bagaimana peran jamaah thariqat Naqsabandiyah dalam andilnya membangun negeri. Keikutsertaan jamaah thariqat Naqsabandiyah dalam menciptakan stabilitas keamanan, ketertiban dan kerukunan antar umat beragama menjadi bukti bahwa jamaah thariqat Naqsabandiyah berjasa besar dalam membesarkan negeri Pelalawan. Sebagai mursyid yang melindungi ratusan surau suluk dari Hulu Rantau Pulau Godang dan sepanjang aliran sungai Kampar sampai ke Pelalawan dan Kabupaten Siak, Tuan Guru Syekh Abdus Samad selalu dijadikan rujukan dan tumpuan harapan orang-orang yang menyatakan diri dalam pemilihan baik sebagai kepala daerah maupun sebagai calon anggota

dewan. Hasil penelitian terdahulu menjadi inspirasi penulis untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana relasi sufi dan politisi.

2. Suhayib. "Pemikiran Said Nursi dalam Pemberdayaan Politik (*al Tamkin al Siyasi*) Masyarakat Muslim Turki (studi atas kitab *al Matsnawi an Nuri*)" dalam An-Nida. Jurnal Pemikiran Islam.¹⁰ Elaborasi pemikiran Said Nursi digali dari sumber primer berjudul Al-Matsnawi An-Nuri. Kesimpulan yang dihasilkan dari kajian tersebut adalah: 1. Pandangan Nursi bahwa tasawuf yang berorientasi pada tarekat banyak memiliki kelemahan, kejumudan dan fanatisme, 2. Nursi kemudian membangun tasawuf yang benar-benar berakar pada al Qurân dan sunnah dan menyandingkannya dengan sains modern, 3. Dengan tasawuf, Nursi membangun komunitas "nurcu" melalui tulisan-tulisannya dan pengajarannya sehingga memiliki kekuatan yang berdimensi politik. Tokoh kharismatik ini mengungkapkan bahwa dimensi politik dan tasawuf dapat berpadu dalam membangun sebuah peradaban besar.
3. Komparasi Pembaharuan Tasawuf Hamka Dan Said Nursi karya Zaprul berupa disertasi. Berdasarkan penelitiannya, Zaprul menyimpulkan bahwa ⁵ secara garis besar, ada empat poin relevansi tasawuf moderat Hamka dan Nursi bagi masyarakat kontemporer. Pertama, sumbangsih kedamaian eksistensial bagi masyarakat kontemporer. Kedua, memberikan bimbingan etis kepada masyarakat luas yang tengah mengalami degradasi moral. Ketiga, sebagai pijakan prinsipil paham pluralisme agama. Tawaran tasawuf moderat

¹⁰Suhayib. *Pemikiran.....*, hal. 60-68

5 berhubungan dengan dimensi metafisis-esoteris yang sejatinya terdapat dalam pelbagai keyakinan agamis. Keempat, kontribusi metode intuitif. Tasawuf moderat Hamka dan Nursi berusaha menghadirkan kembali metode intuitif tersebut dalam ranah ilmu pengetahuan dewasa ini agar metode-metode ilmiah tidak timpang hanya mengenal realitas objektif-empirikal dan rasional, namun melupakan eksistensi meta-empirikal dan supra-rasional”.¹¹

Tinjauan kepustakaan seperti pemaparan di atas menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang Said Nursi. Sudah banyak nilai-nilai positif yang dihasilkan dari usaha memahami langkah perjuangan dan bahkan pemikiran Said Nursi yang tertuang dalam karya-karyanya.

Satu hal yang belum penulis temukan dari karya ilmiah terdahulu adalah pembahasan tentang relasi pemikiran tasawuf Said Nursi dengan politik. Karena itu penelitian tentang relasi tasawuf politik menjadi sangat actual untuk dikaji ulang.

¹¹Zapru. *Komparasi Pembaharuan Tasawuf Hamka Dan Said Nursi*, Disertasi, tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. vii

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan.¹² Data dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan kajian atau pembahasan tasawuf dan politik. Referensi ini tanpa batasan, baik dalam bentuk dokumentasi maupun karya-karya klasik dan modern.

B. Sumber Data

Sumber data di sini dikategorikan kepada tiga, yaitu;

- a. Sumber data primer terdiri dari :
 - 1). Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Priode 2014-2019, dan
 - 2). Mursyid Thariqat beserta jamaahnya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Priode 2014-2019, buku-buku dan berbagai karya ilmiah lainnya yang menulis tentang relasi politik dan tasawuf, antara lain:
 - 1). Suhayib. *Prosesi Amaliyah Suluk, Suatu Kajian Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*. Pekanbaru: Suska Press, 2011

¹²Ju jun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2009), hlm. 307 lihat juga, Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Cet. Ke-9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 173

- 2). Suhayib. *“Menelusuri Akar Sejarah dan Aktivitas Jamaah Tarekat Naqsabandiyah di Kabupaten Pelalawan”*, Laporan Hasil Penelitian, tidak dipublikasikan. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2008.
 - 3). Suhayib. *Tarekat Naqsabandiyah, Sejarah Masuk dan Perkembangannya di Kabupaten Kampar*. Laporan Hasil Penelitian, tidak dipublikasikan. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2007
 - 4). Suhayib. *Tarekat Naqsabandiyah, Sejarah Masuk dan Perkembangannya di Kabupaten Siak*. Pekanbaru: LBSM Riau, 2005
- c. Sumber data tertier, yaitu buku-buku dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Analisis Data

- a. Teknik Pengumpulan Data
 - 1). Observasi. Dalam penelitian ini dilakukan tahap awal melalui pengamatan langsung pada lembaga legislative, personalia pengurus partai politik dan lembaga-lembaga sufi seperti surau suluk.
 - 2). Wawancara, cara ini dipilih pertama karena wawancara merupakan intinya penelitian social. (Saebani,2008:191) Wawancara dimaksudkan untuk menggali secara mendalam hasil pengamatan, sehingga dapat menghasilkan

informasi secara riil tentang hubungan komunikasi antara politisi dan sufi pada ajang pesta demokrasi di Kabupaten Pelalawan.

b. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penjelasan dengan uraian-uraian dari hasil penelitian secara terperinci dan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang mendukung permasalahan tersebut lalu diambil kesimpulan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisa data meliputi :

- 1) Unityzing Data, yaitu penyusunan satuan data berdasarkan tipologi data
- 2) Kategorisasi Data, pengelompokkan data dari satuan data yang telah disusun berdasarkan tepologi sebelumnya.
- 3) Penafsiran Data, yaitu upaya mendeskripsikan secara analitik yang atas data sudah dikategorisasikan, sehingga kemudian akan menghasilkan sebuah teori. Dan “TOERI” dihasilkan merupakan cirri khas dari sebuah penelitian kualitatif.¹³

c. Populasi dan Sampel

- 1). Populasi, Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 35 orang dan kumunitas sufi yang tergabung dalam

¹³ Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1988, hal 6. Bandingkan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal. 122. Lihat pula Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 25

jamaah taekat Naqsabandiyah Kabupaten Pelalawan yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti

2). Sampel

a). Jenis sampel

Dalam penelitian ini seluruh anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, karena itu jenis sample dalam penelitian ini adalah probabilita sampling. (Prasetyo, 2008:122)

b). Teknik penarikan sampel

Karena hanya jumlah anggota DPRD Kabupaten Pelalawan berjumlah 35 orang yang diketahui, sedangkan jumlah komunitas sufi yang tergabung dalam jamaah taekat Naqsabandiyah Kabupaten Pelalawan jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti, maka penarikan sampel pada kondisi seperti ini dilakukan dengan *multistage cluster random sampling*. Yaitu penarikan sampel dua tahapan yaitu; *pertama*, menentukan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang memiliki kedekatan secara emosional kepada tasawuf, dan *kedua*, komunitas sufi yang tergabung dalam jamaah taekat Naqsabandiyah Kabupaten Pelalawan di ambil sebagai sampel secara acak.

D. Tahapan Analisa Data

- a. Mengumpulkan data-data tentang komunikasi politik antara sufi dan politisi di Kabupaten Pelalawan.
- b. Memilih dan memilah data yang sesuai dengan topik penelitian.

- c. Menganalisa data dengan menggunakan metode kualitatif
- d. Membuat kesimpulan tentang relasi antara sufi dan politisi pada masa Pesta Demokrasi Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan tahun 2014.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu;

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Adapun Bab II menjelaskan tentang Sejarah Kabupaten Pelalawan yang meliputi geografi dan demografi, social, ekonomi dan pendidikan

Sedangkan Bab III menerangkan tentang peran politik masyarakat dan dinamika politik di Kabupaten Pelalawan Bab ini meliputi pengertian politik, dinamika politik, pengertian tasawuf, perkembangan tasawuf ke thariqat dan pemberdayaan politik jamaah thareqat.

Bab IV merupakan analisa tentang relasi politikus dan sufi di Kabupaten Pelalawan, meliputi keterlibatan jamaah thareqat dalam pemilihan legislative, dan peran aktif politikus dalam pembinaan jamaah thareqat pada masa dan sesudah pemilihan legislative.

Bab V, terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran

Lampiran

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan catatan sejarah,¹ kabupaten Pelalawan berawal dari kerajaan Pekantua¹⁴ yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M) yang datang dari kerajaan Temasik (Singapura). Beliau adalah orang besar di kerajaan Temasik yang di kalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini terletak di hulu sungai Pekantua, lebih kurang 20 km di hulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk desa Tolam, kecamatan Pelalawan, kabupaten Pelalawan), pada tempat yang bernama "Pematang Tuo".¹⁵

Perubahan nama kerajaan dari Kerajaan Pekantua menjadi kerajaan Pelalawan¹ sekitar tahun 1725 M. Maharaja Dinda II dalam maklumatnya mengumumkan bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi kerajaan Pelalawan yang maknanya "tempat laluan atau

¹⁴ Kerajaan Pekantua tidak disalah-pahami sebagai desa Pekantua yang terletak ditepi sungai Indragiri yang sekarang ini merupakan salah satu desa dalam wilayah kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan langsung dengan kabupaten Indragiri Hulu.¹

¹⁵ *Sejarah Daerah Riau*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 42.

¹ tempat yang sudah lama dicadangkan.¹⁶ Sejak saat maklumat itu diwartakan maka resmilah nama kerajaan Pekantua Kampar diganti dengan kerajaan Pelalawan, dan sebutan Pelalawan terus dipakai sampai kerajaan ini berakhir dengan meleburkan diri menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1944 Pelalawan termasuk dalam kewedanan Selat Panjang, namun sejak 1 Januari 1945 Pelalawan berdiri sendiri sebagai kewedanan Pelalawan ¹ yang meliputi empat kecamatan yakni Kuala Kampar, Bunut, Pangkalan Kuras, dan Langgam.¹⁷ Perubahan tata administrasi ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai problem yang disebabkan tata-letak wilayah yang jauh dan prasarana transportasi dan komunikasi yang tidak memadai.

Lebih kurang 3 tahun berselang ¹ setelah terjadinya penyerahan kedaulatan dan pemulihan kembali pemerintahan sipil, lahirlah UU. Nomor 22 tahun 1948 tentang penghapusan status Keresidenan dan Kewedanaan untuk memperpendek jenjang hirarki pemerintahan. Dalam undang-undang No. 22 tahun 1948 tersebut Kewedanaan Pelalawan dipecah menjadi dua

¹¹⁶Sudirman Shomary (2005), “Hutan Tanah Wilayah dan Permasalahannya di Kabupaten Pelalawan”, Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan, hlm. 40-41.

¹⁷Tenas Effendy,dkk (2005), “Lintas Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)”, Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, hlm. 142.

bagian,¹⁸ masing-masing tiga kecamatan bergabung dengan Kabupaten Bengkalis dan satu bergabung dengan Kabupaten Kampar yang pada saat itu masih Pekanbaru ibukotanya.

Beberapa tahun kemudian terjadi lagi perubahan dengan lahirnya undang-undang No. 12 tahun 1956, menetapkan Kewedanaan Pelalawan terlepas dari kabupaten Bengkalis dan bergabung dengan kabupaten Kampar.¹⁹ Sejak saat itu Pelalawan sebagai ibukota Kewedanaan menjadi Kepenghuluan atau desa dalam wilayah kecamatan Bunut hingga tahun 2000.

Luasnya wilayah Kabupaten Kampar yang meliputi ex kerajaan Pelalawan menyebabkan wilayah ini lambat berkembang. Sebagai gambaran wilayah yang luasnya 12.490,42 KM hanya memiliki jalan aspal 27 KM, dari Simpang Bunut ke kantor Camat Bunut. Demikian juga dengan sarana pendidikan, terutama tingkat SLTP dan SLTA. Fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas air bersih, kesehatan, listrik, telepon dan lain-lain sangat minim.²⁰

¹⁸ Kecamatan Bunut, kecamatan Kuala Kampar, kecamatan Pangkalan Kuras digabung kedalam kabupaten Bengkalis, sedangkan kecamatan Langgam digabung dengan kabupaten Kampar dengan ibukota Pekanbaru

¹⁹ Tenas Effendy,dkk (2005), "*Lintas Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)*", Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, hlm. 151.

²⁰ Tahun 1998 tercatat sebanyak 213.393 jiwa, dengan kepadatan 17 jiwa per KM persegi hanya 22 SLTP/MTS dan 4 SLTA.

¹ Di lihat dari segi pendapatan daerah Pelalawan termasuk penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kampar.²¹ Sejak tahun 1980-an daerah ini menjadi tujuan transmigrasi yang mitra dengan perkebunan besar dan menengah tingkat nasional terutama dalam mengelola kelapa sawit dan mendirikan beberapa pabrik pengolahan hasil sawit. Sumber pendapatan lain bersumber dari perusahaan besar seperti ¹ PT RAPP, Pabrik Indo Sawit, di tambah lagi hasil kayu, rotan, perikanan dan minyak bumi.

¹ Pelalawan sebagai kawasan Kampar Bagian Hilir memiliki adat-istiadat dan sistem sosial budaya yang agak berbeda dengan kawasan Kampar Bagian Hulu yaitu Daerah Andiko Nan 44 yang memiliki kesamaan dengan Minangkabau dan Rokan Hulu yang memiliki kesamaan dengan sosial budaya Tapanuli. Kawasan ini pada umumnya didominasi oleh suku Melayu dengan adat-istiadat yang kental unsur kemelayuannya, baik Melayu Pesisir maupun Melayu Petalangan yang khas.²² Identitas melayu ini kemudian menjadi salah satu aspek yang cukup menentukan dalam proses komunikasi politik di Kabupaten Pelalawan.

¹ Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc dalam bukunya *Riau : Potensi Alam dan Sumber Daya Insani*, telah menyampaikan pentingnya upaya

²¹ ¹ Sampai tahun 1998 dari wilayah Kampar Bagian Hilir (Pelalawan) terkumpul pajak daerah, retribusi, PBB pedesaan, perkotaan, pertambangan dan perkebunan, iuran hasil hutan dan pajak air bawah tanah sejumlah Rp 3.198.868.768,00,-.

²² Tenas Effendy, dkk (2005), "*Lintas Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)*", Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, hlm. 198.

¹ pemekaran kabupaten atau kota di Provinsi Riau dalam rangka percepatan proses pembangunan. Beliau juga mengusulkan pemekaran provinsi Riau menjadi 8 kabupaten dan 9 kotamadya. Salah satu diantaranya kabupaten Kampar Hilir dengan ibukota Pangkalan Kerinci.²³

Pada era reformasi, setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie tanggal 19 Mei 1998, maka terjadi reformasi social politik ditanah air. Tokoh-tokoh masyarakat Pelalawan melihat kesempatan baik itu. Apalagi beberapa daerah lain di Indonesia sudah memperjuangkan wilayahnya dimekarkan menjadi provinsi (seperti Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara, dan Gorontalo) dan kabupaten (seperti di Sumatera Utara, Maluku, Lampung, Jambi, Kalimantan Timur dan Sulewesi Utara dan lain-lain).

Ide dan cita-cita tersebut terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat sesama orang Pelalawan baik di Pekanbaru maupun Bangkinang. Untuk merealisasikannya diadakan rapat tokoh-tokoh masyarakat Kampar Bagian Hilir di rumah Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc tanggal 31 Januari 1999 pukul 20:00-24:00 WIB. Rapat malam tersebut menyepakati pembentukan formatur Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pelalawan yang secara aklamasi memilih Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc sebagai Ketua Umum dan Drs. H. T. Ilyas Usman sebagai Sekretaris Umum serta

¹
²³ Tengku Dahril (1995), *Riau : Potensi Alam dan Sumber Daya Insani*, hlm 75.

¹ beberapa orang anggota. Selain itu rapat tersebut menyepakati Rapat Akbar Masyarakat Kampar Bagian Hilir tanggal 4 Februari 1999 bertempat di aula SMAN 1 Langgam di Pangkalan Kerinci (sekarang SMAN 1 Pangkalan Kerinci).²⁴

Tanggal 11-13 April 1999 dilaksanakan kegiatan Seminar dan Musyawarah Besar di Pangkalan Kerinci. Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Setwilda Riau, H. T. Rafian, B.A bertempat di taman hiburan Lago Indah Pangkalan Kerinci, tanggal 11 April 1999 malam.²⁵ Adapun tujuan dari Seminar dan Muyawarrah Besar ini untuk menghimpun dan menyatukan Visi, Misi, Persepsi, dan aspirasi masyarakat Kampar Bagian Hilir dalam perjuangan pembentukan kabupaten baru di eks kerajaan atau kewedanaan Pelalawan yang terdiri atas empat kecamatan yaitu Langgam, Bunut, Kuala Kampar dan Pangkalan Kuras. Selanjutnya untuk menghimpun pendapat, gagasan, dan saran mengenai kemungkinan pembentukan kabupaten baru dikawasan Kampar Bagian Hilir dari berbagai Sumber dan tokoh masyarakat baik yang berada di Jakarta, Pekanbaru, Bangkinang, maupun yang berada di kawasan Kampar Bagian Hilir.

Kegiatan ini juga menghimpun dan menginventarisasikan data dan informasi yang dapat mendukung pembentukan kabupaten di kawasan

²⁴Tenas Effendy,dkk (2005), “*Lintas Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)*”, Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, hlm. 184.

²⁵*Ibid*, hlm 190.

¹Kampar Bagian Hilir yang didasarkan atas pertimbangan sejarah, geografis, potensi sumber daya alam. Sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan, aspirasi masyarakat, *political will*, pemerintahan dan prospek masa depannya.²⁶

Kesungguhan perjuangan semua lapisan masyarakat Pelalawan membuahkan hasil seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kabupaten Pelalawan berdasarkan ¹UU No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Pelalawan bersama dengan 8 kabupaten atau kota lainnya diprovinsi Riau. Berdasarkan UU tersebut maka kemudian pada tanggal 5 November 1999 dilakukan ¹peresmian kabupaten Pelalawan oleh Gubernur Riau H. Saleh Jasit, SH.²⁷

B. Komunikasi Politik Politisi-Sufi di Kabupaten Pelalawan

1. Komunikasi

Komunikasi dengan berbagai hal terkait seperti tujuan, fungsi, syarat, manfaat komunikasi atau dampak komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan bagian isu yang banyak menarik perhatian.

Menurut Hafied Cangara, komunikasi berasal dari bahasa Latin yakni *commonico* yang artinya membagi, dan *communis* yang berarti membangun

²⁶Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pelalawan (1999), "Laporan Hasil Seminar dan Musyawarah Besar Masyarakat Kampar Bagian Hilir dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, hlm. 15-16.

²⁷Tenas Effendy,dkk (2005), "*Lintas Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)*", Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, hlm 205.

kebersamaan antara dua orang atau lebih.²⁸ Komunikasi selalu didefinisikan dengan proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah.

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris disebut *communication* atau *communis* yang memiliki arti sama, bersama, membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Menurut Hovland komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Pengertian Komunikasi menurut definisi James A.F.Stoner adalah proses dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Sedangkan menurut H.A.W. Widjaya komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok.

William F.Glueck menjelaskan bahwa komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk. sebagai berikut :

- a. *Interpersonal Communications* (komunikasi antarpribadi) adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia.
- b. *Organization Communications* adalah proses dimana pembicara secara sistematis memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang

²⁸Hafied Cangara, *Komunikasi Politik. Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Press. 2011, hlm. 13

yang banyak dalam organisasi dan kepada pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga di luar yang ada hubungan.

Tujuan Komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa tujuan strategis sebagai berikut :

- a. Supaya yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Agar dapat dimengerti oleh komunikan maka komunikator perlu menjelaskan pesan utama dengan sejelas-jelasnya dan sedetail mungkin.
- b. Agar dapat memahami orang lain. Dengan melakukan komunikasi, setiap individu dapat memahami individu yang lain dengan kemampuan mendengar apa yang dibicarakan orang lain.
- c. Agar pendapat kita diterima orang lain. Komunikasi dan pendekatan persuasif merupakan cara agar gagasan kita diterima oleh orang lain.
- d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Komunikasi dan pendekatan persuasif kita mampu membangun persamaan persepsi dengan orang kemudian menggerakkannya sesuai keinginan kita.

³
Fungsi Komunikasi. Komunikasi memiliki fungsi-fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, fungsi komunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai Kendali : Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku orang lain atau anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi.

- b. Sebagai Motivasi : Komunikasi memberikan perkembangan dalam memotivasi dengan memberikan penjelasan dalam hal-hal dalam kehidupan kita.
- c. Sebagai Pengungkapan Emosional : Komunikasi memiliki peranan dalam mengungkapkan perasaan-perasaan kepada orang lain, baik itu senang, gembira, kecewa, tidak suka. dan lain-lainnya.
- d. Sebagai Informasi : Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dari setiap individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dengan meneruskan data guna mengenai dan menilai pemilihan alternatif.

Selain tujuan dan fungsi strategis, dalam berkomunikasi diperlukan syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya. Syarat-syarat komunikasi adalah sebagai berikut :

- a. *Source*: *Source* (sumber) adalah dasar dalam penyampaian pesan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber komunikasi adalah orang, lembaga, buku dan lain-lain.
- b. Komunikator : komunikator adalah pelaku penyampain pesan yang berupa individu yang sedang berbicara atau penulis, dapat juga berupa kelompok orang, organisasi komunikasi seperti televisi, radio, film, surat kabar, dan sebagainya.

c. Pesan : pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator. Pesan mempunyai tema utama sebagai pengarah dalam usaha mengubah sikap dan tingkah laku orang lain.

Agar komunikasi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran diperlukan saluran (*channel*). Saluran adalah komunikator yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Saluran komunikasi berupa saluran formal (resmi) dan saluran informal (tidak resmi). Saluran formal adalah saluran yang mengikuti garis wewenang dari suatu organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dan bawahannya, sedangkan saluran informal adalah saluran yang berupa desas-desus, kabar burung dan kabar angin.

Komunikan : komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi yang berupa individu, kelompok dan massa

Komunikasi menghasilkan effect yaitu berupa hasil akhir dari suatu komunikasi dengan bentuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku komunikan. Perubahan itu bisa sesuai keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan komunikator.

C. Politik

Politik (*politic*)²⁹ yang dalam bahasa Inggris berarti *action*, *sensible* dan *wise* berasal dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan

²⁹ *Oxford Dictionary*. New York: Oxford University Press. 2009, hlm. 340

⁴ pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Karena itu politik merupakan suatu bidang studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan manusia yang lain.³⁰

Pengertian seperti ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi tentang ⁴ hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.³¹

Kata politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, antara lain:

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles),³² karena itu politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, atau kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, atau segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

³⁰ Rafael Raga Maran. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2007, hlm. 18

³¹ Lihat F. Isjwara. *Pengantar ilmu Politik*, Bandung: Putra Badrin, 1999, hlm. 42

³² Lihat Rafael. *Pengantar.....*, hlm. 35

Menurut F. Isjwara³³ bahwa etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni persoalan politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut yaitu:

“polites” berarti warganegara

“politikos” nama sifat yang berarti kewarganegaraan

“politike techne” berarti kemahiran politik

“politike episteme” berarti ilmu politik

Kata ini berpengaruh ke wilayah Romawi sehingga bangsa Romawi memiliki istilah *ars politica* yang berarti kemahiran tentang masalah masalah kenegaraan. Politik pun dikenal dalam bahasa Arab dengan kata *siyasah wadh'iyah*³⁴ yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Pengarang kamus al Muhith mengatakan bahwa *sustu ar-ra'iyata siyasatan* berarti saya memerintahnya dan melarangnya.

Menurut Ramlan Subakti,³⁵ politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang

³³Lihat F. Isjwara. *Pengantar ilmu...*, hlm. 21

³⁴Istilah *siyasah wadh'iyah* diperkenalkan oleh Ahmad Djazuli untuk membedakan dengan *siyasah syar'iyah*. Karena *siyasah wadh'iyah* bertumpu pada adat-istiadat dan pengalaman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan *siyasah syar'iyah* dilandasi dengan syariat atau paling tidak sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kulliy. Lihat A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 44

³⁵Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 1999, hlm. 11

mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Dilihat dari aspek atau ⁴ segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat berarti politik lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan. Sedangkan kalau ⁴ menunjuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu” lebih mengarah pada kebijakan (*policy*) seperti politik luar negeri, politik dalam negeri, politik keuangan.

Sedangkan kalau menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (*siyasa*).

Di antara ketiga definisi tersebut, tentunya definisi pertama lebih memiliki konotasi negatif dibandingkan definisi kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan orientasi yang pertama adalah politik kekuasaan, untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dalam jalan apapun entah baik entah buruk, dapat menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit yang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan terhadap masyarakat, dimana posisi pemimpin merupakan pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset strategis.

D. Komunikasi Politik

Rafael Raga Maran dalam *Pengantar Sosiologi Politik* menyebutkan bahwa komunikasi politik bukanlah sesuatu yang spesifik dan terpisah dari model komunikasi sosial, karena itu pola-pola dasarnya mengikuti pola-pola komunikasi sosial.³⁶

Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Karena itu komunikasi politik merupakan sesuatu yang penting, tanpa komunikasi politik yang efektif maka aktivitas politik akan kehilangan bentuk.³⁷

Komunikasi politik dimaksudkan sebagai suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti. Lebih jauh lagi yang akan dihasilkan melalui komunikasi politik yaitu terbentuknya suatu kegiatan yang memungkinkan terwujudnya cita-cita politik, termasuk upaya untuk memenangkan suatu even seperti perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita seperti itu menurut Dan Nimmo diperlukan kehadiran komunikator politik, karena juru bicara kelompok terorganisasi dan pemuka pendapat memainkan peran aktif dalam komunikasi politik.³⁸

³⁶ Rafael Raga Maran. *Pengantar*, hlm. 163

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Dan Nimmo. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosda Karya, hlm.

Komunikasi politik yang merupakan penghubungan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, instansi ataupun sektor kehidupan politik pemerintah sangat tergantung dengan tiga hal yaitu, *Pertama* menampilkan gaya umum partisipasi. *Kedua*, motif yang mendasari kegiatan, *ketiga* konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.³⁹

Alfian seperti dikutip oleh Hafied menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi politik adalah menyambungkan semua bagian dari sistem politik, sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Bila komunikasi itu berjalan lancar, wajar dan sehat maka sistem politik akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman.⁴⁰

Mengutip pendapat Karl W. Deutsch dalam Michael Rush dan Philip Althoff komunikasi politik merupakan transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain dan antara sistem sosial dan sistem politik sebagai unsur dinamis dari suatu sistem politik.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 127

⁴⁰ Hafied Cangara, *Komunikasi....* hlm. 13

⁴¹ Michael Rush dan Philip Althoff. *An Introduction to Political Sociology*, terj. Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali Press. 2008, hlm. 253

Komunikasi politik tidak dapat berdiri sendiri kecuali melalui bantuan lainnya yang disebut dengan saluran politik. Menurut Rafael⁴² saluran politik terdiri dari tiga unsur yaitu media massa, kelompok kepentingan dan kontak antarpribadi. Media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid, televisi, dan radio merupakan saluran utama komunikasi politik. Format informasi politik melalui media massa dapat ditampilkan dengan gaya, bahasa dan gambar yang menarik sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan dapat disesuaikan dengan kecendrungan kelompok sasaran. Selain media massa, saluran komunikasi politik dapat dilakukan melalui kelompok kepentingan. Unsur kedua ini biasanya tergabung dalam satu wadah, ikatan seperti partai politik dan jabatan. Ikatan dalam satu partai yang sama dan struktur dalam jabatan memungkinkan untuk terjalinnya komunikasi yang baik dalam upaya menempatkan kepentingan bersama.

Aspek ketiga saluran komunikasi politik adalah kontak pribadi maupun antar kelompok. Relasi *face to face* merupakan cara yang efektif untuk menciptakan opini publik. Saluran inilah yang sesungguhnya berlaku sebagai saluran komunikasi politik antara politisi dan sufi di Kabupaten Pelalawan pada masa pemilu legeslatif tahun 2014.

E. Komunikasi Politisi Sufi di Pelalawan

Pada setiap proses politik komunikasi politik menempati posisi yang strategis. Bahkan, komunikasi politik dinyatakan sebagai “urat nadi” proses

⁴² Lihat Rafael, *Pengantar*, hlm. 163-6

politik. Bagaimana tidak, berbagai struktur politik termasuk partai politik memperoleh informasi politik serta dukungan politik melalui komunikasi politik ini. Kehadiran lembaga-lembaga keagamaan seperti lembaga thariqat selalu dijadikan sebagai sarana komunikasi politik antara politisi dengan para sufi (istilah yang diberikan kepada komunitas thariqat) pada setiap event politik tidak terkecuali pada event pemilihan anggota legislatif (pilleg). Komunikasi politisi-sufi selalu diharapkan adanya “satu komando” dari para mursyid kepada seluruh jamaahnya untuk memberikan dukungan politik kepada para politisi sesuai dengan pilihan mursyidnya.

Komunikasi politisi-sufi di Pelalawan dari kalangan partai yang berbasis Islam seperti PPP dan PKB tidak terjalin secara efektif.⁴³ Hal ini menurut politisi PPP disebabkan diantaranya para politis partai berlambang Ka’bah ini merupakan “pemain baru” yang belum memiliki saluran komunikasi yang efektif sekalipun sebenarnya secara emosional diantara mereka ada ‘kedekatan” pada aspek keislamannya. Di samping mereka sebagai “pemain baru” di kancah perpolitikan, menurut mereka tidak terwujudnya komunikasi politisi-sufi disebabkan dampak atau pengaruh faham “liberalisme”.⁴⁴ Konsekuensi dari faham tersebut adalah jamaah thariqat memberikan pilihannya kepada siapapun dari partai manapun, tidak harus memilih partai yang berbasis keislaman. Konsekuensi lebih jauh dari faham liberalisme ini adalah adanya perubahan orientasi hidup yang berujung

⁴³ Junaidi Purba, Ketua PPP Kabupaten Pelalawan dan Anggota DPR Pelalawan, wawancara, tanggal 6 Oktober 2017

⁴⁴ *Ibid*

pada kesenangan duniawi. Ketika keadaan ini menjadi orientasi hidup, maka para mursyid dan jaamaahnya akan memberikan dukungannya kepada para politisi yang mapan secara ekonomis.

Berbeda dengan politisi partai yang berbasis Islam, politisi partai yang tidak berbasis Islam terutama partai “penguasa” seperti Golkar, memandang terjadi komunikasi politik antara politisi-sufi secara intens.⁴⁵ Menurut mereka, intensitas komunikasi politik tersebut disebabkan berbagai faktor di antaranya; faktor kekerabatan, faktor hubungan guru-murid, dan tidak terkecuali faktor ekonomi. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan legislatif di Pelalawan tahun 2014 yang lalu, intensitas komunikasi politik politisi-sufi tidak menunjukkan adanya “satu komando” dari mursyid kepada jamaah thariqatnya untuk memberikan dukungan kepada politisi tertentu, tetapi memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan pilihannya. Hal ini disebabkan karena diantara para politisi yang akan “bertarung” pada pilleg tersebut merupakan murid atau jamaah thariqat dari partai yang berbeda.⁴⁶ Dengan demikian faktor yang dominan dalam relasi politisi-sufi di Pelalawan adalah faktor kekerabatan dan faktor ekonomi.⁴⁷

Besarnya faktor ekonomi menjadi penentu adanya dukungan kepada para politisi, menunjukkan kuatnya pengaruh faham “liberalisme” sebagaimana yang

⁴⁵ Nazaruddin, politisi partai Golkar dan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, wawancara, tanggal 6 Oktober 2017

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Burhan, politisi partai Golkar yang sebelumnya ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pelalawan. Wawancara, 27 Juli 2017

disebutkan di atas, dan pengaruh tersebut juga ‘merambah” ke lembaga-lembaga keagamaan termasuk lembaga thariqat.

F. Realitas Komunikasi Poltik 2014 di Kabupaten Pelalawan

Tahun 2014 kabupaten Pelalawan telah menyelenggarakan pemilu legeslatif. Partai peserta pemilu terlibat secara aktif untuk mendapatkan kursi keterwakilannya di DPRD Pelalawan selama lima tahun. Hasilnya 35 caleg terpilih untuk DPRD Pelalawan periode 2014-2019 setelah KPU Pelalawan menuntaskan pleno perhitungan suara tingkat kabupaten.

Tabel IV. 1

Daftar Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil)

No	Dapil	Jlh Kursi	Keterangan
1	Satu	12	Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Langgam dan Kecamatan Pangkalan Kerinci
2	Dua	9	Bandar Petalangan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar
3	Tiga	6	Kecamatan Ukui dan Kecamatan Perumutan
4	Empat	8	Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Pangkalan Kuras
Jumlah		35	12 Kecamatan

² Dapil Satu dengan jumlah 12 kursi, meliputi wilayah pemilihan Kecamatan Bandar Seikijang, kecamatan Langgam dan Kecamatan Pangkalan

Kerinci diantaranya : 1. Ir. Rustam Sinaga (Nasdem) 2. H. Abdullah (PKS) 3. Syafrizal SE (PDIP) 4. Saniman, SE (PDIP) 5. Fatmalena (PG) 6. Afrizal (PG) 7. Faizal, SE.M.Si (Gerindra) 8. Monang Pasaribu (PD) 9. Beny Ilham (PAN) 10. Junaidi Purba (PPP) 11. Eliman M (Hanura) 12. Mardemis (PBB.)

Data perolehan kursi DPRD Kabupaten Pelalawan tahun 2014 dapil satu yang meliputi wilayah kecamatan Bandar Seikijang, Langgam dan Kecamatan pangkalan Kerinci memperoleh 12 kursi, dengan klasifikasi :

Tabel IV. 2

Daftar Partai, Perolehan Kursi Legeslatif Kabupaten Pelalawan

Daerah Pemilihan Satu (Dapil 1)

No	Partai	Jlh Kursi	Keterangan
1	Demokrat	1	Monang Pasaribu
2	Gerindra	1	Faizal, SE.M.Si
3	Golkar	2	Fatmalena Afrizal
4	Hanura	1	Eliman M
5	Nasdem	1	Ir. Rustam Sinaga
6	PAN	1	Beny Ilham
7	PBB	1	Mardemis
8	PDIP	2	Syafrizal SE Saniman, SE
9	PKS	1	H. Abdullah
10	PPP	1	Junaidi Purba

Data olahan 2017

Penyebaran perolehan suara seperti ditunjukkan pada tabel tersebut bahwa tidak ada partai yang mendominasi perolehan suara pada dapil satu yang meliputi Kecamatan Bandar Seikijang (31.908 jiwa), kecamatan Langgam (29.797) dan Kecamatan Pangkalan Kerinci (111.385) Padahal bila dilihat dari segi jumlah penduduk (173.090 Jiwa) pada tahun 2014, dapil satu menempati urutan pertama sebagai penyumbang suara terbesar bagi partai. Penyebaran suara yang merata ini menjadi indikator heterogennya masyarakat dan hilangnya identitas kemelayuan yang terukir dalam tradisi kesultanan sekaligus hilangnya sosok yang dapat diterima orang banyak.

Sebagai ibu kota kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci dihuni oleh berbagai komunitas, selain masyarakat asli, pendatang dari berbagai suku dan etnis berdomisili di ibu kota kabupaten.

Masyarakat yang heterogen pada ibu kota Kabupaten Pelalawan belum menemukan sosok, tokoh, panutan pemuka adat, sebagai perekat yang dapat dijadikan panutan. Oleh sebab itu keputusan dalam menentukan pilihan berdasarkan kecendrungan pribadi.

Tabel IV. 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Dapil Pemilahan Anggota DPRD di
Kabupaten Pelalawan tahun 2014

Dapil	Kecamatan	Penduduk/jiwa	Jumlah
1	Bandar Seikijang	31.908	173.090
	Langgam	29.797	

	Pangkalan Kerinci	111.385	
2	Bandar Petalangan	14 106	83.196
	Bunut	15 071	
	Pelalawan	19 214	
	Teluk Meranti	16 786	
	Kuala Kampar	18 019	
3	Ukui	38.764	62.051
	Kerumutan	23.287	
4	Pangkalan Lesung	31.147	88.917
	Pangkalan Kuras	57.770	
Total		407.254	407.254

Data olahan 2017

Hasil pemilu legeslatif tahun 2014, ²Dapil dua dengan wilayah pemilihan Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar dengan jumlah 9 kursi di wilayah tersebut yang akan duduk di kursi legislatif diantaranya : 1. Eka Putra (Golkar) 2. Said Mashudi,(Golkar) 3. H. Indra Mansur (Golkar) 4. Nazaruddin Arnazh (PAN) 5. Evi Zulvian (Demokrat) 6. Indra Kampe (Gerindra) 7. T. Khairil (Hanura) 8. Nurulhadi (PPP) 9. Suprianto SP (PDI-P).

Tabel IV. 4

Daftar Paertai, Perolehan Kursi Legeslatif Kabupaten Pelalawan

Daerah Pemilihan Dua (Dapil 2)

No	Partai	Jlh Kursi	Keterangan
1	Demokrat	1	
2	Gerindra	1	
3	Golkar	3	
4	Hanura	1	
6	PAN	1	
8	PDIP	1	
10	PPP	1	
Jumlah		9	

Data olahan 2017

Secara kuantitas dapil dua didominasi perolehan suara Partai Golkar. Posisi ini dapat mencerminkan bahwa partai Golkar hampir tidak mendapat saingan berarti dalam perebutan simpati pemilih pada ajang demokrasi pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan tahun 2014.

Dominasi Partai Golkar pada dapil dua dengan lima kecamatan masing-masing ² Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar dengan jumlah penduduk sekitar 83.196 jiwa.

Bila dilihat dari aspek geografis, kecamatan yang masuk dalam Dapil dua adalah daerah yang berhubungan langsung dengan jalur sungai sebagai transportasi utama masa lalu. Dengan kacamata ini maka dapat dipastikan bahwa masyarakat pada lima kecamatan dalam wilayah dapil dua dapat

dipastikan secara mayoritas mereka adalah penduduk asli atau penduduk tempatan sebagai masyarakat Melayu Pelalawan.

Sedangkan bila dicermati dari aspek kultural, kekerabatan melayu telah membentuk hubungan emosional untuk tetap mempertahankan eksistensi kemelayuan di eks kesultanan Pelalawan, sehingga sentuhan dari orang-orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting dapat dengan mudah menyatukan persepsi termasuk dalam menentukan pilihan baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemilihan Kepala Daerah.

Tabel IV. 5

Daftar Partai dan Perolehan Kursi Legeslatif Kabupaten Pelalawan

Daerah Pemilihan Tiga (Dapil 3)

No	Partai	Jlh Kursi	Keterangan
1	Gerindra	1	
2	Golkar	3	
3	PAN	1	
4	PDIP	1	
Jumlah		6	

Data olahan 2017

Daerah pemilhan (Dapil Tiga) terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Ukui dan Kecamatan Kerumutan. Perolehan suara pada dapil tiga sebanyak

enam kursi sebagai berikut : ² 1. Imustiar (Golkar) 2. Rinto (Golkar) 3. Replita (Golkar) 4. Kasyadi (PDI-P) 5. Sudirman (PAN) 6. Ade Irawan (Gerindra).

Daerah pemilihan tiga terdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan Ukui dan kecamatan Kerumutan dengan total populasi 62.051 jiwa menyumbangkan 6 orang anggota dewan pada pemilu legeslatif tahun 2014.

Partai Golongan Karya unggul dalam perolehan suara pada dapil tiga dari pesaingnya seperti Partai Gerinda, PAN dan PDIP yang hanya memperoleh masing-masing satu wakil di legislatif.

Masyarakat pemilih pada dapil tiga juga sangat heterogin. Keberadaan perusahaan dan perkebunan kelapa sawit banyak mendatangkan pekerja pabrik dan petani perkebunan kelapa sawit, karena itu ikatan emosional yang terbentuk berdasarkan suku atau etnis tidak terlalu kental. Mobilisasi masa untuk meraih suara terbanyak pada dapil tiga ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kerja antara majikan dan pekerja, baik di pabrik maupun diperkebunan.

Beberapa perusahaan besar yang memiliki masa pemilih yang besar pula seperti :

PT. Sari Lembah Subur (perkebunan kelapa sawit + 2 PKS) UKUI dan Kerumutan

BUMD Buah Sekata (perkebunan kelapa sawit)

PT. Mekarsari Alam Lestari anak perusahaan PT. Darmex Agro Grop
(Kerumutan)⁴⁸

PT. Indosawit Subur (perkebunan kelapa sawit + 2 PKS) UKUI

PT. Gandahera Hendana (perkebunan kelapa sawit + PKS) UKUI⁴⁹

Keberhasilan Partai Golkar mendulang suara pada dapil tiga sangat dipengaruhi oleh kuatnya ikatan emosional perusahaan dengan pekerja dan hubungan perusahaan dengan pejabat yang notabene pengurus partai. Hubungan emosional ini telah membentuk segitiga emas antara pemerintah, perusahaan dan pekerja.

Tabel IV. 6

Daftar Partai, Perolehan Kursi Legislatif Kabupaten Pelalawan

Daerah Pemilihan Empat (Dapil 4)

No	Partai	Jlh Kursi	Keterangan
1	Gerindra	1	Oerpan
2	Golkar	3	Nasaruddin Baharuddin A. Mudzakir
3	Hanura	1	Mukhlis Ali
4	PAN	1	Habibi Hapri
5	PDIP	1	Suprianto Agustinus
6	PKB	1	Rahman Wijayanto
Jumlah		8	

Data olahan 2017

⁴⁸ www.direktorisawit.com. Diakses tanggal 14 September 2017

⁴⁹ Repository.uin-suska.ac.id. Diakses tanggal 14 September 2017

Pesta demokrasi pemilihan legeslatif 2014 pada daerah pemilihan empat² (Dapil Empat) yang meliputi Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Pangkalan Kuras dengan jumlah 8 kursi di wilayah tersebut yang akan duduk di kursi legislatif diantaranya : 1. Rahman Wijayanto (PKB) 2. Suprianto Agustinus (PDI-P) 3. Nasaruddin (Golkar) 4. Baharuddin (Golkar) 5. A. Mudzakir (Golkar) 6. Oerpan (Gerindra) 7. Habibi Hapri (PAN) 8. Mukhlis Ali (Hanura).

Kondisi sosial masyarakat pada dapil empat tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada dapil tiga. Ketergantungan pekerja pada perusahaan telah membentuk kepatuhan dan kestiaan antara pekerja dengan pihak perusahaan. Demikian juga komunikasi dan relasi pihak perusahaan dengan pemerintah berkait kelindan sehingga tercipta komunikasi satu arah pada pilihan bersama.

Berbagai faktor seperti disebutkan di atas mencerminkan bahwa ikatan emosional akan terbentuk melalui beberapa simpul seperti :

1. Ikatan kekerabatan
2. Ikatan kerja
3. Ikatan politis

Ikatan kekerabatan terjadi di sepanjang aliran sungai yang pada masa silam menjadi urat nadi transportasi. Masyarakat yang mendiami aliran

sungai masih banyak yang tetap bertahan, mereka merupakan puak melayu Pelalawan yang sejak dahulu dikenal dengan kesultanan Pelalawan dan masih kental dengan ras serta budaya melayu pelalawan. Iktan ini menjadi modal besar bagi pucuk pimpinan negeri, Bupati dan sekaligus sebagai pimpinan Partai Golkar untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan bersama.

Demikian pula dengan ikatan hubungan kerja, ketergantungan pekerja dengan pekerjaannya pada perusahaan bukan dikarenakan propesi akan tetapi lebih disebabkan pada pemenuhan kebutuhan hidup. Sulitnya mendapatkan pekerjaan seiring dengan tingginya tuntutan keperluan menyebabkan banyak pekerja yang harus bekerja diluar kelayakannya.⁵⁰ Persoalan lain yang cukup menentukan dalam mengambil sikap memilih pekerjaan adalah latar belakang pendidikan dan keterampilan. Sumberdaya manusia yang terbatas menyebabkan tidak ada pilihan mencari pekerjaan dan penghasilan yang lebih menjanjikan.

Akumulasi dari berbagai persoalan yang dihadapi tenaga kerja baik di perusahaan maupun di perkebunan, kemudian berbuah manis bagi pengusaha dan penentu kebijakan. Pengusaha mendapatkan kenyamanan dan perlindungan, sedangkan penguasa mendapatkan dukungan secara moril dan materil. Realisasi dari saling keterkaitan tersebut menjadikan partai

⁵⁰ Sirkulasi sip dengan 8 jam kerja perhari secara otomatis akan menyeret kaum wanita masuk bekerja pada jam yang seharusnya seorang ibu bersama anak-anaknya di rumah terutama di malam hari.

pemerintah berkuasa unggul secara signifikan yaitu 11 kursi legislatif pada pemilihan legislatif kabupaten Pelalawan tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan pemilihan anggota legeslatif di Kabupaten Pelalawan telah berlangsung Komunikasi politik politisi sufi secara intensif. Berbagai strategi komunikasi dilakukan para politisi baik secara individu dan kolektif melalui partai pengusung calon yang diunggulkan untuk mendulang suara pemilih pada kelompok sufi yang tergabung dalam ikatan tarikat Naqsabandiyah pimpinan Mursyid Tuan Guru Syekh Haji Abdus Somad bin Tuan Guru Syekh Haji Ja'far. Ikatan emosional dan garis komando dalam system thariqat dengan pola *sami'na wa atha'na* merupakan sasaran yang dijadikan alasan kuat para politisi untuk berebut masa sufi.

Realitas politisi sufi ternyata tidak terlalu efektif, karena pola hirarki yang terdapat pada tarekat Naqsabandiyah di Pelalawan pada pemilu legislative tahun 2014 tidak berjalan seperti yang diharapkan, hal itu disebabkan :

1. Beberapa anggota calon legislative yang ikut dalam pemilihan berasal dari keluarga jamaah tarikat Naqsabandiyah, sehingga mursyid mengambil sikap menyerahkan pilihan kepada jamaah dengan bebas di antara calon yang berasal dari keluarga jamaah. Keputusan mursyid mendorong ikatan kekerabatan, ikatan kerja dan ikatan politis yang meraih keuntungan.

2. Adanya pengaruh liberalisme dan materialisme yang turut mempengaruhi keputusan dalam menentukan pilihan.

B. Penutup

Keputusan yang diambil Robet tentang peran sufi yang tak bisa dipandang sebelah mata dalam memobilisasi masa ternyata masih cukup akurat, hal itu masih terbukti dalam system kekerabatan jamaah tarikat Naqsabandiyah di Kabupaten Pelalawan, bahwa otoritaas Mursyid dihargai dalam bentuk kepatuhan yang kuat, sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan kepada mursyid merupakan harga mati. Dari sisi inilah yang menjadi perhatian serius politisi untuk meraih dukungan, sehingga diperlukan komunikasi politik secara entens dengan sufi.

Komunukasi politik politisi sufi tahun 2014 di Pelalawan sedikit berbeda. Beberapa calon ligeslatif kabupaten Pelalawan 2014-2019 merupakan keluarga dan bahkan jamaah tarekat Naqsabandiyah. Berhadapan dengan kondisi seperti ini maka mursyid memberikan kebebasan kepada jamaah tarekat untuk menentukan pilihan. Keran kebebasan ini ternyata sangat menguntungkan calon yang memiliki modal signifikan dan terbukti secara kuat bahwa liberalism dan materialism telah mewarnai kehidupan sufi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Cet. Ke-9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Ali Muhammad ash-Shalabi. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Ali Muhammad ash-Shalabi. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung; Pustaka Setia, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung; Pustaka Setia, 2008
- Dan Nimmo. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosda Karya
- Departemen Agama RI, *Al Qurân dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al Qurân, 1971
- F. Isjwara. *Pengantar ilmu Politik*, Bandung: Putra Badrin, 1999
- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2003

- G. Sevela Consuelo, et., all., *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Ibrahim Abu Rabi' & Jane I. Smith (eds.), *Special Issue Said Nursi and the Turkish Experience*, *The Muslim World*, Vol. LXXXIV, No. 3-4. July-October, 1999
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1988
- Michael Rush dan Philip Althoff. *An Introduction to Political Sociology*, terj. Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali Press. 2008
- Oxford Dictionary. New York: Oxford University Press. 2009, hlm. 340
- Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pelalawan (1999), "Laporan Hasil Seminar dan Musyawarah Besar Masyarakat Kampar Bagian Hilir dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru
- Rafael Raga Maran. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2007
- Samlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 1999
- Said Nursi, *Al-Malâhiq*, terj. Ihsan Qasim Salih Istanbul: Sozler Yayinevi, 1995
- P. Varma. *Teori Politik Modern*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Sudirman Shomary (2005), "Hutan Tanah Wilayah dan Permasalahannya di Kabupaten Pelalawan", Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan
- Suhayib. "Pemikiran Tasawuf Nursi dalam Pemberdayaan Politik (*al-Tamkin al-Siyasi*) Masyarakat Muslim Turki (Studi Atas Kitab *Al-Matsnawi An-Nuri*), *An-Nida'*, Vol. 38 No. 1 Januari – Juni 2013
- Syekh Abdul Qadir Isa. *Hakekat Tasawuf*, terj. Khairul Amru Harahap dkk., Jakarta: Qisthi Press, 2011
- Tenas Effendy, dkk (2005), "Lintas Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)", Pemerintahan Kabupaten Pelalawan
- Tengku Dahril (1995), *Riau : Potensi Alam dan Sumber Daya Insani*
- Thomas W. Arnold. *Sejarah Da'wah Islam*, terj. Nawawi Rambe, Jakarta: Widjaya, 1985
- Zaprul. *Komparasi Pembaharuan Tasawuf Hamka Dan Said Nursi*, Disertasi, tidak dipublikasikan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011

Laporan Penelitian Relasi Tasawuf dan Politik

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

imappelsumbar.blogspot.com

Internet Source

11%

2

highlists.blogspot.com

Internet Source

6%

3

eprints.umm.ac.id

Internet Source

2%

4

id.wikipedia.org

Internet Source

2%

5

risalahpress.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On